



DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI BALI

DOKUMEN (RENJA) RENCANA KERJA TAHUN 2026



KATA PENGANTAR

Atas Asung Kertha Waranugraha dan dengan mengucapkan Puja Astuti Anghayu Bagia dihadapan Ida Sanghyang Widhi Wasa/ Tuhan Yang Maha Esa Karena atas berkat dan rahmat-Nya penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Provinsi Bali Tahun 2026 dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

Penyusunan Rencana Kerja (Re1nja) Dinas Perhubungan Provinsi Bali Tahun 2026 merupakan Rencana Kerja Tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Provinsi Bali tahun 2025 - 2029 yang mengacu pada RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali 2025 -2029, sehingga pembangunan dibidang transportasi yang dilaksanakan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan terukur baik kuantitatif maupun kualitatif. Keberhasilan akan dapat dicapai, apabila dalam melaksanakan program/kegiatan pemerintah dan pembangunan, mempunyai acuan yang jelas dan mendapat dukungan dari berbagai pihak.

Kami menyadari bahwa Rencana Kerja ini belum sempurna karena keterbatasan dalam penyusunan nya, untuk itu diharapkan masukan dari berbagai pihak sehingga dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan yang direncanakan.

Bali, 15 Agustus 2025

Kepala Dinas Perhubungan Prov. Bali



IGW. Bangsi Gunarta
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19650807 199603 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI.....	2
BAB I. PENDAHULUAN.....	3
1.1 Latar Belakang.....	3
1.2 Landasan Hukum.....	8
1.3 Maksud dan Tujuan	10
1.4 Sistematika Penulisan.....	11
BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	12
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun	
Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	12
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	29
2.3 Isu – isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	
Perangkat Daerah.....	30
2.4 Review terhadap RKPD	32
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	34
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	38
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	38
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	39
3.3 Program dan Kegiatan.....	42
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN.....	60
BAB V. PENUTUP	66

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan semakin berkembangnya paradigma baru dalam kehidupan sosial politik, ekonomi di masyarakat, menuntut adanya perubahan penyelenggaraan manajemen pemerintahan dan pembangunan, menuju sistem pemerintahan yang baik dalam arti berdaya guna, berhasil guna, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme serta penegakan demokrasi dan keadilan (*Good Governance*).

Tuntutan cita-cita luhur tersebut akan dapat diwujudkan, apabila seluruh jajaran aparatur pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan dan pembangunan memiliki akuntabilitas kinerja yang baik dalam arti arah kebijakan dan program/kegiatan yang akan dilaksanakan mempunyai rencana maksud, tujuan yang jelas dan terarah, legalitas kewenangan, indikator sasaran yang terukur, serta dilaksanakan secara transparan dan bertanggung jawab dalam arti bermanfaat bagi kepentingan publik.

Transportasi merupakan urat nadi kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara, mempunyai fungsi penggerak, pendorong dan penunjang pembangunan, dimana dalam penyelenggaraannya banyak elemen yang terkait seperti sarana, prasarana, pergerakan, sertifikasi, kelaikan, perambuan, kenavigasian, sumber daya manusia, geografi, demografi dan lainnya.

Keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh peran sektor transportasi, sehingga sistem transportasi harus terus dibina, agar mampu menghasilkan jasa transportasi yang handal, berkemampuan tinggi dan diselenggarakan secara terpadu, tertib, lancar, aman, nyaman dan efisien dalam menunjang sekaligus menggerakkan dinamika pembangunan; mendukung mobilitas barang dan jasa; mendukung pola distribusi nasional serta mendukung pengembangan wilayah, meningkatkan hubungan antar wilayah, nasional dan internasional dalam perkembangan kehidupan

berbangsa dan bernegara. Dengan demikian pembangunan transportasi perlu terus dimantapkan dan dikembangkan sejalan dengan tuntutan kualitas pelayanan dan meningkatnya kebutuhan mobilitas barang dan jasa agar mampu menunjang pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi masyarakat daerah dan stabilitas nasional.

Adanya isu – isu strategis yang berkembang dalam sektor perhubungan antara lain :

- a. Terjadinya Kemacetan lalu lintas terutama di daerah Kawasan Sarbagita dan Pusat-pusat kegiatan wisata;
- b. Tingginya kejadian kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia di Provinsi Bali;
- c. Masih rendahnya penggunaan angkutan umum;
- d. Masih terbatasnya kapasitas layanan prasarana transportasi (Bandara, Pelabuhan, Jalan, dan Terminal); dan
- e. Terbatasnya pengembangan sistem jaringan prasarana transportasi yang handal dan terintegrasi untuk menunjang pertumbuhan ekonomi, mewujudkan keseimbangan pembangunan serta konektivitas antar wilayah.

Berkenaan dengan pembangunan daerah, telah digariskan bahwa apa yang menjadi visi-misi daerah harus selaras dengan visi-misi pembangunan nasional (RPJMN 2025-2029). Dalam pandangan pemerintah pusat terhadap pembangunan daerah, bahwa visi dari pembangunan daerah adalah terwujudnya kapasitas daerah yang maju dengan masyarakat yang mandiri. Sedangkan misi pembangunan daerah adalah: (1) memantapkan otonomi daerah dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan; (2) mempercepat pengembangan wilayah dengan mengutamakan peningkatan daya saing sebagai dasar pertumbuhan daerah; (3) pemerataan antar daerah; (4) pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan; (5) meningkatkan kapasitas masyarakat dengan memberikan hak kepada masyarakat untuk pengembangan diri, meningkatkan akses informasi kepada masyarakat dengan memberi hak informasi untuk pengembangan pribadi dan

lingkungan sosialnya; serta (6) mempercepat penyelesaian masalah sosial, ekonomi, politik serta hukum di beberapa daerah.

Memperhatikan berbagai uraian tersebut di atas secara umum memiliki kesamaan dengan arah pembangunan daerah Provinsi Bali dengan Visi Pembangunan Bali “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” melalui pola pembangunan semesta berencana dengan 7 (tujuh) bidang prioritas pembangunan Bali yaitu: Bidang 1: Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal; Bidang 2: Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan; Bidang 3: Ekonomi *Kerthi* Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata; Bidang 4: Infrastruktur Darat, Laut, dan Udara, serta Transportasi; Bidang 5: Lingkungan, Kehutanan, dan Energi Bidang; 6: Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali dan Bidang 7: Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi. Untuk mewujudkan kelima bidang tersebut transporasai mempunyai peran yang sangat penting sebagai urat nadi pembangunan di Provinsi Bali yaitu dengan didukung dengan pembangunan infrastruktur bidang perhubungan darat, laut dan udara secara teriteraksi dan terkoneksi. Kelima prioritas pembangunan tersebut dipadukan dalam kerangka vitalisasi dan aktualisasi melalui pelaksanaan strategi, seperti peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan publik yang sulit terlaksana tanpa diimbangi oleh peningkatan kualitas SDM.

Melakukan pembangunan dan pengembangan Infrastruktur, strategi ini merupakan upaya untuk mendukung capaian sasaran yang akan dilakukan pada Tujuan 3 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029 yakni Meningkatnya Laju dan Ketahanan Perekonomian Bali Berbasis Ekonomi *Kerthi* Bali. Salah satu pijakan utama strategi ini adalah berkaitan dengan permasalahan utama pembangunan ekonomi Bali yang masih belum merata, sehingga masih terdapat ketimpangan pembangunan antar wilayah utara, selatan, dan barat serta timur Bali. Pengembangan dan peningkatan infrastruktur yang baik diseluruh kawasan/wilayah Bali, diharapkan akan dapat mempercepat

pembangunan ekonomi terutama potensi-potensi yang ada di pelosok-pelosok pedesaan atau di pusat-pusat ekonomi kerakyatan yang ada di daerah di Provinsi Bali.

Strategi dan arah kebijakan yang dilakukan secara khusus di sektor transportasi, strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah di Provinsi Bali perlu pula mengakomodir program – program yang selaras dengan Pemerintah Pusat. Selain itu perlu pula mengakomodir program – program dalam rangka pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang perhubungan daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 2 Tahun 2013.

Untuk menunjang strategi dan arah kebijakan maka urusan perhubungan melaksanakan :

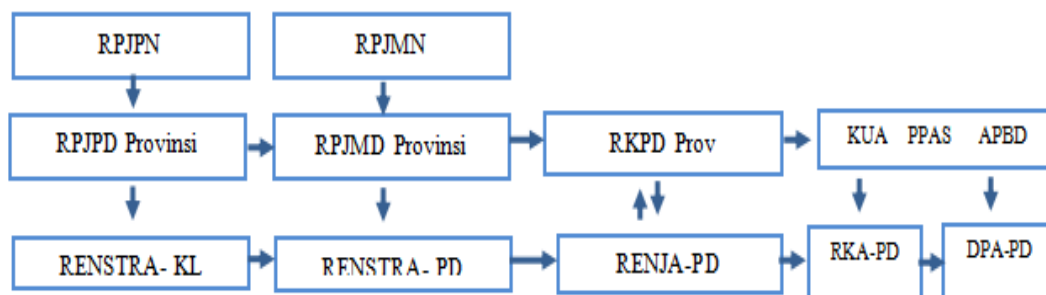
- 1) Pengembangan dan preservasi jaringan jalan dan jembatan dalam mendukung aktivitas pengguna jalan;
- 2) Peningkatan perilaku pengguna jalan yang berkeselamatan serta peningkatan kendaraan yang berkeselamatan dalam rangka menekan tingkat kecelakaan lalu lintas;
- 3) Revitalisasi angkutan umum, penyediaan angkutan umum yang berkualitas khususnya di daerah perkotaan dalam mengurangi kemacetan;
- 4) Optimalisasi Manajemen rekayasa lalu lintas dan penyediaan serta pemeliharaan fasilitas keselamatan di jalan raya dalam mengoptimalkan penggunaan jaringan jalan dan pergerakan lalu lintas untuk menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan;
- 5) Pembangunan/pengembangan/peningkatan prasarana dan fasilitas perhubungan dalam mendukung keseimbangan dan konektivitas wilayah;
- 6) Penataan jaringan transportasi darat, laut dan udara antar kabupaten/kota.

Untuk memenuhi tuntutan tersebut, Dinas Perhubungan Provinsi Bali menyusun Rencana Kerja Tahun 2026 mengacu pada RKPD Dinas Perhubungan Provinsi Bali tahun 2026, yang merupakan turunan dan pelaksanaan dari Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Bali yang telah menyesuaikan dan mengacu pada RPJMD Provinsi Bali tahun 2025 - 2029 serta mengacu pada pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Provinsi Bali Tahun 2026 dilakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Proses perencanaan pembangunan Dinas Perhubungan Provinsi Bali mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Daerah.

Rencana Pembangunan Daerah yang ditindaklanjuti dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah, memperhatikan prioritas program dan kegiatan. Seluruh kegiatan beserta anggarannya dibahas pada Forum Perangkat Daerah. Hasil pembahasan pada Forum Perangkat Daerah ditindaklanjuti dalam pembahasan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi sampai pada akhirnya akan ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Hubungan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Provinsi Bali dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Mengacu pada Diagram diatas dapat dijelaskan secara rinci hubungan dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dengan dokumen

perencanaan dan penganggaran lainnya. Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan Kebijakan Umum Anggaran/Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS) menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah, selanjutnya akan menjadi acuan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah, yang merupakan penjabaran dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
17. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan Dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
18. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 72);
19. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2045
20. Peraturan Gubernur Bali Nomor 32 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Bali Tahun 2026

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 Dinas Perhubungan Provinsi Bali adalah untuk melaksanakan dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah periode 1 (satu) tahun anggaran yang diselaraskan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta dokumen perencanaan di atasnya yakni RPJMD Semesta Berencana 2025-2029 dan Renstra. Rancangan Rencana Kerja disusun juga untuk menggambarkan secara umum capaian kinerja yang ingin dicapai untuk

dapat ditransformasikan ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah.

Sedangkan tujuan penyusunan Renja adalah:

1. Menyelaraskan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan dokumen visi dan misi Rancangan RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029 serta Rancangan Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029;
2. Mendeskripsikan tentang program/kegiatan baik prioritas maupun non prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Perangkat Daerah dalam 1 tahun anggaran;
3. Menghasilkan kinerja yang baik dan alokasi anggaran yang tepat sasaran serta akuntabel.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Bali Tahun 2026 ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan sistematika penyusunannya adalah sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
- BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
- BAB IV : RANCANGAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- BAB V : PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BALI

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja program dan kegiatan tahun berjalan, terdapat pelaksanaan anggaran yang berpedoman pada RKPD 2026. Selain itu, terdapat penyesuaian atas usulan berdasarkan hasil musrenbang dan kebutuhan mendesak di lapangan. Oleh karena itu, Dinas Perhubungan menyusun Renja sebagai respons atas evaluasi kinerja dan dinamika kebijakan. Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah meliputi:

- a) Persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah;
- b) Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah;
- c) Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah;
- d) Penyusunan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah; dan
- e) Penetapan Renja Perangkat Daerah

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024, dan Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024. Pada tahun anggaran 2024 Dinas Perhubungan Provinsi Bali melaksanakan 4 Program dan 16 Kegiatan yang tersebar di seluruh Bidang dan UPTD. yang ada di lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Bali.

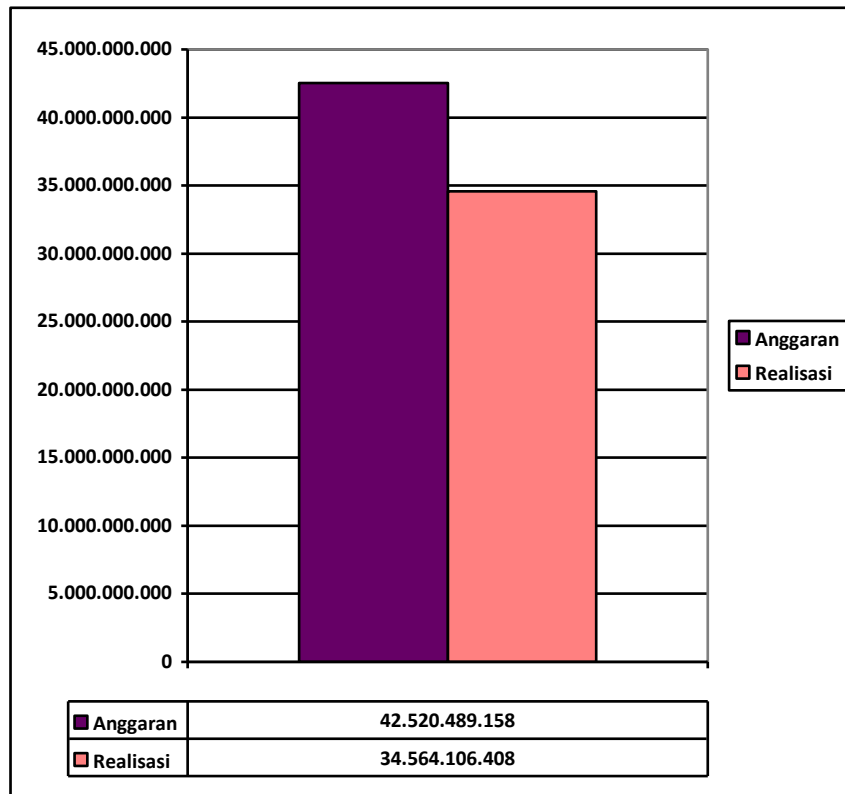
Rekapitulasi Sebaran Belanja Langsung
Dinas Perhubungan Provinsi Bali Dalam APBD Tahun 2024

No.	Bidang/UPTD	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Pagu	Jumlah Realisasi
1	2	3	4	5	6
1	Sekretariat	1	6	23.616.604.577	22.077.275.227
2	Bidang Angkutan	1	2	502.850.080	434.730.945
3	bidang Lalu Lintas	1	2	504.180.940	455.739.683
4	Bidang Pelayaran	1	1	871.047.840	853.040.800
5	Bidang Keterpaduan Moda	1	1	472.437.140	453.934.073
6	UPTD. Pusat Pengendalian Lalu Lintas	2	5	2.450.394.222	2.141.575.662
7	UPTD. Trans Bali/Trans Sarbagita	2	5	11.527.841.343	5.762.717.605
8	UPTD. Perlengkapan Jalan	2	4	1.886.976.726	1.752.680.365
9	UPTD. Penyelenggaraan Pelabuhan	2	5	688.156.290	632.412.048
JUMLAH			31	42.520.489.158	34.564.106.408

Berdasarkan tabel monitoring realisasi fisik dan keuangan kegiatan yang ada di Dinas Perhubungan Provinsi Bali per Desember tahun 2024 maka secara keseluruhan dapat kami laporkan dari keseluruhan nilai rencana anggaran Tahun 2024 sebesar Rp. 42.520.489.158,- terealisasi sebesar Rp. 34.564.106.408,- dengan sisa anggaran sebesar Rp. 7.956.382.750,-. Menurut laporan realisasi fisik dan keuangan dana APBD Periode Triwulan IV Tahun 2024 Dinas Perhubungan Provinsi Bali,

keseluruhan pelaksanaan Renja tahun 2024 sampai Triwulan IV dapat berjalan dengan baik.

Target dan Realisasi BL Dinas Perhubungan Provinsi Bali Tahun 2024



Walaupun dalam laporan pencapaian target menunjukkan kondisi yang baik/ideal bukan berarti tidak terjadi permasalahan. Terdapat beberapa target yang tidak tercapai seperti penurunan target pendapatan, capaian kinerja dan lainnya yang perlu untuk disampaikan dan dianalisa. Beberapa faktor yang berpengaruh dapat disampaikan sebagai berikut;

- Pencapaian Target Pendapatan

Capaian Target Pendapatan cukup jauh dari target yang disusun, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yakni menurunnya pendapatan tiket bus Trans Sarbagita karena adanya kebijakan tiket gratis bagi pengguna pelajar/mahasiswa. Selain itu penurunan jumlah penumpang umum juga turut berdampak.

Selain pendapatan Trans Sarbagita, pungutan retribusi Kartu Pengawasan juga mengalami sedikit penurunan jumlah pengurusan.

- Pencapaian Target Kinerja

Beberapa Target Kinerja menunjukkan data tidak tercapai sesuai target yang diharapkan. Adapun beberapa faktor yang berpengaruh sebagai berikut;

- a. Tidak tercapainya target indikator Persentase penerapan manajemen keselamatan di pelabuhan pengumpan regional. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2024 belum dilakukan pengambilalihan operasional pelabuhan pengumpan regional. Sehingga target 100% belum dapat dilakukan pengukuran.
- b. Tidak tercapainya target indikator Persentase lalu lintas angkutan jalan yang berkeselamatan. Hal ini disebabkan oleh masih rendahnya kesadaran pengguna jalan, dimana alokasi anggaran yang dipergunakan untuk melakukan penindakan belum cukup efektif untuk menimbulkan efek jera.
- c. Tidak tercapainya target indikator Terwujudnya peningkatan pelayanan angkutan. Hal ini disebabkan oleh tingkat pengurusan perijinan yang kurang patuh dan paham prosedur pengurusan perijinan.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Provinsi Bali dan Pencapaian Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Bali s/d Tahun 2024 tertuang pada Tabel 2.1

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun
2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah) tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	DINAS PERHUBUNGAN								
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN								
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Kinerja	83,90 Nilai	83,85 Persen	83,85 Persen	100%%	83,90 Persen		
2.15.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	100%	8 Dokumen		
2.15.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	5 Dokumen		
2.15.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100%	3 Laporan		
2.15.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen gaji , tunjangan dan administrasi penyediaan perlengkapan kantor	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	1 Dokumen		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.15.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	103 Orang/Bulan	96 Orang/Bulan	96 Orang/Bulan	100%	210 Orang/Bulan		
2.15.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen		
2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran	1 Tahun	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	1 Tahun		
2.15.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket		
2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket		
2.15.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket		
2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket		
2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan		
2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran	1 Tahun	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	1 Tahun		
2.15.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	9 Unit	9 Unit	100%	3 Unit		
2.15.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	55 Paket	55 Paket	100%	1 Paket		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran	1 Tahun	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	1 Tahun		
2.15.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan		
2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan		
2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan		
2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran	1 Tahun	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	1 Tahun		
2.15.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	20 Unit	20 Unit	100%	14 Unit		
2.15.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	55 Unit	45 Unit	45 Unit	100%	63 Unit		
2.15.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	5 Unit	5 Unit	100%	6 Unit		
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio konektivitas layanan angkutan darat	0,88 Rasio	0,86 Rasio	0,86 Rasio	100%	0,88 Rasio		
2.15.02.1.05	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	1 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	1 Laporan		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah) tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.15.02.1.05.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan		
2.15.02.1.05.0005	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan		
2.15.02.1.06	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas untuk Jalan Provinsi yang ditindaklanjuti	3 Laporan	13 Laporan	13 Laporan	100%	1 Laporan		
2.15.02.1.06.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	3 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	100%	3 Laporan		
2.15.02.1.06.0004	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	3 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	100%	3 Laporan		
2.15.02.1.10	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Rencana Umum Jaringan Trayek Antar Kota Dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan Yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Dokumen		
2.15.02.1.10.0004	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen		
2.15.02.1.13	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	380 Unit	1 Laporan	1 Laporan	100%	380 Unit		
2.15.02.1.13.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan	380 Unit	10 Unit	10 Unit	100%	380 Unit		
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Aksesibilitas Pelayaran	80 Persen	75 Persen	75 Persen	100%	80 Persen		
2.15.03.1.08	Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah dokumen kajian	1 Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Laporan		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.15.03.1.08.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen		
2.15.05	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Persentase lintasan kereta api yang terbangun	35 Persen	25 Persen	25 Persen	100%	35 Persen		
2.15.05.1.01	Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Dokumen Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen		
2.15.05.1.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Dokumen Rencana Induk Perkeretaapian	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen		
	UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ								
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN								
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Kinerja	83,90 Nilai	83,85 Persen	83,85 Persen	100%	83,90 Nilai		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan 1 Paket	11 Paket	11 Paket	100%	1 Laporan 1 Paket		
2.15.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket		
2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket		
2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket		
2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan		
2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	100%	1 Laporan		
2.15.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan		
2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan		
2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan		

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10 Unit 12 Unit	20 Unit	20 Unit	100%	10 Unit 12 Unit		
2.15.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10 Unit	2 Unit	2 Unit	100%	10 Unit		
2.15.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	12 Unit	12 Unit	100%	18 Unit		
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase pencapaian waktu tempuh 2,5 jam/100Km dari KSP menuju jalan nasional	66 Persen	65 Persen	65 Persen	100%	66 Persen		
2.15.02.1.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara	14 Unit	14 Unit	14 Unit	100%	14 Unit		
2.15.02.1.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara	14 Unit	14 Unit	14 Unit	100%	14 Unit		
2.15.02.1.05	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	1 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	100%	1 Laporan		
2.15.02.1.05.0001	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan		
	UPTD TRANS BALI/TRANS SARBAGITA								
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Kinerja	83,90 Nilai	83,85 Persen	83,85 Persen	100%	83,90 Nilai		
2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang tersedia	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun		
2.15.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket		
2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket		
2.15.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket		
2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket		
2.15.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen		
2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan		
2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah kursi yang disediakan	2 Unit 3 Paket	10 Unit	10 Unit	100%	2 Unit 3 Paket		
2.15.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	3 Paket		
2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa pelayanan umum Kantor yang disediakan	1 Tahun	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Tahun		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.15.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan		
2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100%	1 Laporan		
2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan		
2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan AC, Komputer (PC), Laptop, Printer dan kendaraan yang tersedia	1 Tahun	24 Unit	24 Unit	100%	1 Tahun		
2.15.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	6 Unit	6 Unit	100%	6 Unit		
2.15.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	18 Unit	18 Unit	100%	18 Unit		
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Indeks kepuasan layanan angkutan Trans Bali/Trans Sarbagita	83 Indeks	82,85 Persen	82,85 Persen	100%	83 Indeks		
2.15.02.1.08	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Jasa Layanan Angkutan Umum Trans Sarbagita	7332 RIT	7332 RIT	7332 RIT	100%	7332 RIT		
2.15.02.1.08.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	10 Unit	10 Unit	10 Unit	100%	85 Unit		
	UPTD PERLENGKAPAN JALAN								
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN								
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Kinerja	83,90 Nilai	82,85 Persen	82,85 Persen	100%	83,90 Nilai		
2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan, Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan 1 Paket	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	15 Laporan 1 Paket		
2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket		
2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	100%	15 Laporan		
2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	2 Unit	19 Unit	19 Unit	100%	5 Unit		
2.15.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	19 Unit	19 Unit	100%	5 Unit		
2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara, Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	2 Unit 16 Unit	15 Unit	15 Unit	100%	2 Unit 16 Unit		
2.15.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3 Unit	2 Unit	2 Unit	100%	3 Unit		
2.15.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 Unit	12 Unit	12 Unit	100%	16 Unit		
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Sarana dan Prasarana Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam kondisi baik	43,75 Persen	38,58 Persen	38,58 Persen	100%	43,75 Persen		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.15.02.1.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	450 Unit 700 Unit	4388 Unit 760 Unit	4388 Unit 760 Unit	100%	450 Unit 700 Unit		
2.15.02.1.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	300 Unit	3877 Unit	3877 Unit	100%	300 Unit		
2.15.02.1.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara	246 Unit	760 Unit	760 Unit	100%	246 Unit		
	UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN								
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN								
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Kinerja	83,90 Nilai	83,85 Persen	83,85 Persen	100%	83,90 Nilai		
2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bahan Bacaan dan Perundang-undangan Yang Tersedia Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang Tersedia Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Jumlah Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang tersedia	1 Paket 1 Tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Paket 1 Tahun		
2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket		
2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan		
2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Mebel yang Tersedia Jumlah Sarana Prasarana Pendukung yang Tersedia	1 Paket	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Paket		
2.15.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket		
2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah materai tersedia untuk administrasi perkantoran	1 Paket	150 Lembar	150 Lembar	100%	1 Paket		
2.15.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan		
2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan AC, Komputer (PC), Laptop, Printer dan kendaraan yang tersedia	2 Unit 1 Paket	10 Unit	10 Unit	100%	2 Unit 1 Paket		
2.15.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2 Unit	2 Unit	100%	2 Unit		
2.15.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	8 Unit	8 Unit	100%	8 Unit		
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Pelabuan Pengumpan Regional yang Operasionalnya menerapkan SPM	50 Persen	50 Persen	50 Persen	100%	50 Persen		
2.15.03.1.09	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	19 Laporan	19 Laporan	19 Laporan	100%	19 Laporan		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.15.03.1.09.0004	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	19 Laporan	19 Laporan	19 Laporan	100%	19 Laporan		

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Mengacu pada realisasi anggaran Belanja Langsung pada tahun 2024, secara umum dapat digambarkan bahwa pelaksanaan Program/Kegiatan dapat berjalan dengan baik. Beberapa kegiatan prioritas dapat terlaksana walaupun dengan kondisi yang kurang ideal. Tercapainya SOP pada penerapan operasional Pelabuhan pengumpan regional telah dijalankan dengan baik sesuai prosedur standar dan melayani 50% penatalaksanaan standar pelayanan pada pertengahan tahun ini. Sedangkan pada SPM Dinas Perhubungan juga menerapkan pada layanan Angkutan Umum Trans Sarbagita, dimana SPM sendiri telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur. Capaian kinerja dari penerapan SPM Trans Sarbagita dapat dilihat dari pencapaian tingkat pelayanan angkutan Trans Sarbagita itu sendiri, dimana pada tahun 2024 capaian sudah sesuai dengan target sebesar 73%.

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Bali dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Perhubungan Provinsi Bali beserta target dan capaian realisasinya. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Bali dituangkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Provinsi Bali

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian	Capaian Analisis
				Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	
				2024	2025	2026	2024	
1	Persentase perencanaan Pembangunan infrastuktu perkeretaapian yang telah memiliki kriteria kesiapan			N/A	N/A	33.33	0	Indikator Baru

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian	Capaian Analisis
				Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	
				2024	2025	2026	2024	
2	Presentase Pembangunan/ Lanjutan/ Penyelesaian dan Pengembangan Pelabuhan Laut			N/A	N/A	33%	0	Indikator Baru
3	Persentase Pelabuhan Pengumpulan Regional yang Sudah Menerapkan SPM			50%	50%	67%	50%	
4	Presentase manajemen rekayasa lalu lintas yang ditindak lanjuti			N/A	N/A	100%	0	Indikator Baru
5	Tingkat pelayanan Simpang (tundaan) pada simpang ATCS			N/A	N/A	E (tundaan 40-60 dtk)	0	Indikator Baru
6	Presentase jaringan transportasi darat yang terlayani			N/A	N/A	75	0	Indikator Baru
7	Indeks kepuasan Masyarakat atas Layanan angkutan umum			82.5	83	83.2	82.5	
8	Persentase Perlengkapan Jalan yang telah terpasang dan terpelihara terhadap kondisi ideal pada jalan provinsi			38.58	43.75	49.48	38.58	
9	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja			83.85	83.90	83.95	83.85	

2.3 Isu – isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dari analisa perkembangan pembangunan infrastruktur di Provinsi Bali, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ada beberapa isu-isu penting pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Provinsi Bali, sebagai berikut:

- Belum meratanya pembangunan ekonomi di Provinsi Bali (antar kabupaten/ kota)
- Masih rendahnya konektivitas antar wilayah di Provinsi Bali

- Belum semua kabupaten/ kota terhubung oleh moda transportasi umum (hanya daerah yang dilalui oleh transportasi umum menuju Pelabuhan Gilimanuk dan Padangbay)

Beberapa isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota memiliki karakteristik yang sama. Isu – isu seperti keselamatan berlalu lintas, tingkat pelayanan ruas jalan, tingkat pelayanan angkutan umum, pemenuhan infrastruktur Perhubungan masih menjadi isu yang diangkat dan belum mendapat perhatian khusus. Selaras dengan isu tersebut, beberapa juga merupakan isu yang diangkat ketingkat nasional oleh Kementerian Perhubungan, sehingga terjadi sinergitas Program baik dari tingkat Pusat, Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota. Isu - isu strategis urusan Perhubungan, sebagai berikut:

- Terjadinya Kemacetan lalu lintas terutama di daerah Kawasan Sarbagita dan Pusat-pusat kegiatan wisata
- Tingginya kejadian kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia di Provinsi Bali
- Masih rendahnya penggunaan angkutan umum
- Masih terbatasnya kapasitas layanan prasarana transportasi (Bandara, Pelabuhan, Jalan, dan Terminal)
- Terbatasnya pengembangan sistem jaringan prasarana transportasi yang handal dan terintegrasi untuk menunjang pertumbuhan ekonomi, mewujudkan keseimbangan pembangunan serta konektivitas antar wilayah

Rekomendasi strategis yang dapat dilakukan sebagai tindak lanjut dari isu yang dihadapi antara lain:

- Penerapan sistem manajemen lalu lintas berbasis teknologi
- Peningkatan edukasi dan kampanye keselamatan berkendara secara massif.
- Modernisasi dan integrasi angkutan umum, seperti pengembangan sistem Bus Rapid Transit (BRT) berbasis koridor utama Sarbagita

- Digitalisasi sistem tiket dan rute untuk kemudahan akses informasi oleh masyarakat dan wisatawan
- Perluasan dan modernisasi pelabuhan dan bandara, termasuk konektivitas ke/dari simpul transportasi darat.
- Peningkatan kualitas dan kapasitas terminal dan halte untuk kenyamanan pengguna.
- Pengembangan jaringan transportasi antarwilayah berbasis multimoda
- Optimalisasi konektivitas antar simpul transportasi

Permasalahan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah selain minimnya alokasi anggaran dalam pemenuhan kebutuhan, juga berasal dari beberapa permasalahan kewenangan yang belum diselesaikan serta permasalahan payung hukum yang belum jelas.

Dampaknya bila permasalahan itu tidak diselesaikan maka pemenuhan target kinerja yang berasal dari visi dan misi kepala daerah akan menjadi terganggu dan cenderung tidak terpenuhi. Sehingga diperlukan penelaahan yang lebih mendalam.

Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah. Saat ini Perangkat Daerah terus diminta untuk berinovasi terhadap peningkatan pelayanan kepada publik, melalui program-program kemasyarakatan dan program-program prioritas teknis yang akan memberikan dampak makro yang positif kepada masyarakat. Peluang untuk mewujudkan transportasi publik dan diharapkan dapat berkelanjutan, sedangkan pengembangan potensi lainnya seperti penyediaan infrastruktur penunjang transportasi Bali seperti Pelabuhan, Bandar Udara dan Terminal dapat dijadikan sebagai peluang untuk mewujudkan pelayanan transportasi yang handal.

2.4 Review terhadap RKPD

Secara umum isi daripada RKPD 2026 sudah dianalisis berdasarkan analisis kebutuhan, dimana usulan Program/Kegiatan yang

ada didalam RKPD telah terakomodasi dengan baik pada Renja Perangkat Daerah.

Dari 4 program yang diusulkan dalam usulan RKPD secara keseluruhan dapat terakomodasi. Namun dari pembiayaan yang diusulkan dalam usulan awal RKPD belum dapat secara utuh terpenuhi mengingat keterbatasan keuangan Daerah, sehingga diperlukan analisa yang lebih mendalam terhadap Program/Kegiatan yang diprioritaskan untuk tahun 2026.

Review terhadap RKPD tahun 2026 pada Dinas Perhubungan Provinsi Bali tersaji pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.4
Review Terhadap RKPD Tahun 2026 Dinas Perhubungan Provinsi Bali

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	Program Penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	Denpasar	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	84	35.735.500.434	Program Penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	Denpasar	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	84	39.898.127.701	
2	Program Pengelolaan Keretaapian	9 Kab./Kota	Jumlah perencanaan pembangunan infrastruktur yang telah memiliki kriteria kesiapan	1	1.100.000.000	Program Pengelolaan Keretaapian	9 Kab./Kota	Jumlah perencanaan pembangunan infrastruktur yang telah memiliki kriteria kesiapan	1	1.500.000.000	
3	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	9 Kab./Kota	Jumlah perencanaan dan pengawasan manajemen rekayasa lalu lintas yang ditindak lanjuti	20	739.966.492	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	9 Kab./Kota	Jumlah perencanaan dan pengawasan manajemen rekayasa lalu lintas yang ditindak lanjuti	20	1.162.113.313	
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	9 Kab./Kota	Jumlah jaringan transportasi darat yang terlayani	7	800.000.000	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	9 Kab./Kota	Jumlah jaringan transportasi yang terlayani	7	1.150.000.000	

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	9 Kab./Kota	Indeks Kepuasan Layanan Angkutan Perkotaan di Sarbagita	83	65.408.511.082	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	9 Kab./Kota	Indeks kepuasan terhadap kinerja sistem Transportasi Bali	83	72.500.000.000	
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	9 Kab./Kota	Tingkat pelayanan simpang (tundaan) pada simpang ATCS	E (tundaan 40-60 dtk)	1.160.265.968	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	9 Kab./Kota	Tingkat pelayanan simpang (tundaan) pada simpang ATCS	E (tundaan 40-60 dtk)	3.701.994.760	
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	9 Kab./Kota	Persentase Sarana dan Prasarana Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam kondisi baik	49,48 Persen	2.260.000.000	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	9 Kab./Kota	Persentase Sarana dan Prasarana Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam kondisi baik	49,48 Persen	3.487.282.752	
4	Program Pengelolaan Pelayaran	9 Kab./Kota	Persentase Pembangunan/Lanjutan/ Penyelesaian dan Pengembangan Pelabuhan Laut	67	500.000.000	Program Pengelolaan Pelayaran	9 Kab./Kota	Persentase pelabuhan pengumpan regional yang operasionalnya menerapkan SPM	67	61.382.332.460	
	Program Pengelolaan Pelayaran	9 Kab./Kota	Persentase pelabuhan pengumpan regional yang operasionalnya menerapkan SPM	50	140.000.000	Program Pengelolaan Pelayaran	9 Kab./Kota	Persentase pelabuhan pengumpan regional yang operasionalnya menerapkan SPM	50	160.471.230	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Renja Dinas Perhubungan Provinsi Bali Tahun 2026 akan dibahas dalam berbagai Forum baik pada Forum Perangkat Daerah hingga Musrenbang Provinsi yang akan diikuti oleh Seluruh Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota se Bali dan Instansi vertikal / Balai Kementerian Perhubungan di Provinsi Bali, Bapeda Provinsi Bali, Instansi terkait, tokoh-tokoh masyarakat Transportasi, kalangan akademisi, kelompok ahli dan Organisasi transportasi di Bali. Usulan dan masukan dari peserta forum selanjutnya akan ditelaah sehingga rencana kerja akan dapat mengakomodasi segala kebutuhan masyarakat terkait transportasi di Provinsi Bali.

Review terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat tahun 2026 pada Dinas Perhubungan Provinsi Bali tersaji pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.5
Review Terhadap RKPD Tahun 2026 Dinas Perhubungan Provinsi Bali

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
Dinas Perhubungan					
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		<i>Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja</i>	83,95 Nilai	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		<i>Presentase jaringan transportasi darat yang terlayani</i>	75%	Kajian terminal tipe B
			<i>Presentase manajemen rekayasa lalu lintas yang ditindak lanjuti</i>	100%	
3	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		<i>Persentase Pembangunan/Lanjutan/ Penyelesaian dan Pengembangan Pelabuhan Laut</i>	67 Persen	Pembebasan lahan Sangsit
4	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN		<i>Presentase perencanaan pembangunan infrastruktur perkeretaapian yang telah memiliki kriteria kesiapan</i>	33.33	
UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ					
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		<i>Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja</i>	83,95 Nilai	

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		<i>Tingkat pelayanan simpang (tundaan) pada simpang ATCS</i>	E (tundaan 40-60 dtk)	
UPTD TRANS BALI/TRANS SARBAGITA					
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		<i>Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja</i>	83,95 Nilai	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		<i>Indeks Kepuasan Layanan Angkutan Perkotaan di Sarbagita</i>	83 Indeks	
UPTD PERLENGKAPAN JALAN					
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		<i>Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja</i>	83,90 Nilai	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		<i>Persentase Sarana dan Prasarana Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam kondisi baik</i>	49,48 Persen	Usulan terkait Zoss dan Rambu Jalan
UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN					

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		<i>Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja</i>	83,95 Nilai	
2	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		<i>Persentase Pelabuhan Pengumpulan Regional yang Menerapkan SPM</i>	67 Persen	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Untuk mendukung Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden, Kementerian Perhubungan memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penyelenggaraan pelayanan, keselamatan, dan keamanan transportasi, serta peningkatan aksesibilitas, konektivitas, dan kapasitas sarana dan prasarana transportasi. Dukungan sektor transportasi secara langsung dapat dilakukan pada seluruh Asta Cita dalam bentuk kebijakan dan program sektor transportasi untuk mendorong pemerataan pembangunan sarana, prasarana, dan layanan transportasi di seluruh Indonesia.

Arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional Dinas Perhubungan Provinsi Bali mengacu pada Prioritas Nasional Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah. Mendasari kondisi tersebut ditetapkan visi Kementerian Perhubungan adalah **“Terwujudnya Konektivitas Nasional yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah”**. Hal tersebut merupakan cita-cita Kementerian Perhubungan dimana konektivitas merupakan kunci utama pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah. **Konektivitas Nasional** adalah terhubungnya antar wilayah di seluruh nusantara termasuk angkutan perkotaan baik dengan transportasi darat, kereta api, laut, sungai dan penyeberangan serta udara.

Penyusunan Prioritas dan Sasaran pembangunan daerah pada RKPD Provinsi Bali Tahun 2026 disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029. Prioritas pembangunan daerah dimaksudkan juga untuk menjaga percepatan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional. Selanjutnya, penentuan prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi Bali tahun 2026 juga diarahkan untuk mendukung terwujudnya prioritas pembangunan nasional yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2026.

Keterkaitan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2026 dan RKP Tahun 2026 juga menyangkut sinergi dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Provinsi Bali dengan Kebijakan Pemerintah Pusat dalam mendukung pelaksanaan agenda pembangunan nasional. Hal ini diwujudkan dengan penyelarasan perumusan Tema dan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional. Penyusunan RKPD Provinsi Bali Tahun 2026 juga memperhatikan arah kebijakan Kementerian dan Lembaga, sehingga menjadi dokumen yang integratif, komprehensif, sinergis, dan konstruktif dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Dinas Perhubungan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029. Secara lebih detail, terinci, lebih tergambar dengan jelas yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kerangka kinerja pembangunan secara keseluruhan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam Menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Adapun tujuan dan sasaran sebagai berikut:

- Tujuan : Terwujudnya Transportasi yang Handal, Berkeselamatan dan Ramah Lingkungan dengan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Transportasi(Terkait aspek Aman, Nyaman, Selamat dan Terjangkau)
- Sasaran 1 : Terwujudnya Konektivitas Layanan Transportasi Provinsi Bali dengan Indikator Rasio Konektivitas Layanan Transportasi di Kawasan Strategis Wilayah dan Kawasan Strategis Lokal di Provinsi Bali
- Sasaran 2 : Menurunnya Tingkat Kemacetan Lalu Lintas dengan Indikator Rasio Tingkat Pelayanan Jalan (V/C Rasio) Jalan Provinsi
- Sasaran 3 : Meningkatnya Penggunaan Angkutan Umum dengan

Indikator Jumlah Pengguna Angkutan Umum

Sasaran 4 : Meningkatnya Keselamatan Transportasi Daerah dengan Indikator Tingkat Keselamatan Transportasi Jalan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, bersifat idealistik dan mengandung nilai – nilai keinginan yang kuat untuk melakukan perubahan yang lebih baik dan merupakan arah perjalanan pemerintah dan pembangunan yang jelas berdasarkan kriteria – kriteria, akseptabilitas, aksesibilitas dan kewenangan yang mudah dipahami seluruh masyarakat.

Sedangkan sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan yakni suatu yang akan dicapai berdasarkan kebijakan, alokasi sumber daya, program dan kegiatan yang ditetapkan untuk jangka waktu tertentu yakni tahunan dan lima tahunan.

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BALI TAHUN 2025-2029								
No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE				
				1	2	3	4	5
1	Terwujudnya Transportasi yang Handal, Berkeselamatan dan Ramah Lingkungan	Terwujudnya Konektivitas Pelayanan Transportasi di Provinsi Bali	Perencanaan pembangunan infrastruktur perkeretaapian yang telah memiliki kriteria kesiapan	N/A	33.33	44.44	55.56	66.67
			Presentase Pembangunan/ Lanjutan/ Penyelesaian dan Pengembangan Pelabuhan Laut	N/A	33%	33%	67%	67%

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BALI TAHUN 2025-2029								
No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE				
				1	2	3	4	5
			Persentase Pelabuhan Pengumpan Regional yang sudah Menerapkan SPM	50%	67%	67%	67%	67%
		Menurunnya Tingkat Kemacetan Lalu Lintas	Presentase manajemen rekayasa lalu lintas yang ditindak lanjuti	N/A	100%	100%	100%	100%
			Meningkatnya tingkat pelayanan simpang (tundaan) pada simpang ATCS	N/A	E (tundaan 40-60 dtk)	E (tundaan 40-60 dtk)	E (tundaan 40-60 dtk)	E (tundaan 40-60 dtk)
		Meningkatnya Penggunaan Angkutan Umum dan Kendaraan Ramah Lingkungan	Presentase jaringan transportasi yang terlayani	N/A	75	80	85	90
			Indeks kepuasan masyarakat atas layanan angkutan umum	83	83.2	83.4	83.6	83.8
		Meningkatnya Keselamatan Transportasi Daerah	Persentase Perlengkapan Jalan yang telah terpasang dan terpelihara terhadap kondisi ideal pada jalan provinsi	43.74	49.48	55.21	60.95	66.68
		Terwujudnya Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83.90	83.95	84	84.05	84.10

3.3 Program dan Kegiatan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, Susunan organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Bali terdiri atas 1 Sekretariat, 4 Bidang, dan 4 UPTD dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Sekretariat;
2. Bidang Lalu Lintas Jalan;
3. Bidang Angkutan Jalan;
4. Bidang Pelayaran;
5. Bidang Keterpaduan Moda;
6. UPTD. Pusat Pengendalian Lalu Lintas Angkutan Jalan;
7. UPTD. Trans Bali/Trans Sarbagita;
8. UPTD. Perlengkapan Jalan; dan
9. UPTD. Penyelenggaraan Pelabuhan.

Dalam rangka merumuskan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan 2026, mempertimbangkan pencapaian visi misi Kepala Daerah Provinsi Bali, peningkatan konektivitas, optimalisasi layanan angkutan umum, dan layanan transportasi lainnya di sektor perhubungan. Dinas Perhubungan Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026 merencanakan 4 Program, 17 Kegiatan dan 33 Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Dengan kegiatan Program adalah sebagai berikut:

- a. Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- c. Administrasi Kepegawaian
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pengadaan Mebel
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

Dengan kegiatan Program adalah sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi
 - Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi
 - Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi
 - Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi
- b. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin
 - Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin
- c. Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya Melampaui Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
 - Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Sewa Khusus dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi
- d. Penertiban Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Peroleh Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
- e. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

- Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - f. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi
 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi
 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
3. PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN
- Dengan kegiatan Program adalah sebagai berikut:
- a. Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional
 - Pelaksanaan, Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR) / Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional
 - b. Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas
 - Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
 - c. Pembangunan, Penertiban Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpul Regional
 - Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional
4. PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN

Dengan kegiatan Program adalah sebagai berikut:

- a. Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian
 - Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian

Belanja Langsung pada Dinas Perhubungan dalam Rancangan Rencana Kerja Tahun 2026 ditetapkan dengan 4 Program dan 17 Kegiatan dengan 33 Sub Kegiatan yang tersebar pada Sekretariat, Bidang dan UPTD. Sebaran lokasi pelaksanaan Program/Kegiatan teknis secara umum tersebar pada 9 Kabupaten/Kota sesuai usulan berdasarkan kewenangan serta lingkup koordinasi. Sedangkan Program/Kegiatan rutin perkantoran berlokasi di Denpasar. Berikut Rekapitulasi rancangan pagu Program/Kegiatan pada Sekretariat, Bidang dan UPTD dilingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Bali yang terdapat dalam Dinas Perhubungan Provinsi Bali Tahun 2026.

Secara rinci rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu indikatif sebagai usulan dari Dinas Perhubungan Provinsi Bali yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 disesuaikan dengan pagu tahap perencanaan RKPD Tahun 2026 serta Perkiraan maju Tahun 2027 dapat dilihat pada Tabel 3.3

Tabel 3.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
Dan Prakiraan Maju Tahun 2027

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
	DINAS PERHUBUNGAN				36.561.936.970,00				39.062.823.141,00
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				36.561.936.970,00				39.062.823.141,00
2,15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				36.561.936.970,00				39.062.823.141,00
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<i>Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja</i>		83,90 Nilai	33.421.970.478,00			-	35.358.000.000,00
2.15.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>		8 Dokumen	58.879.000,00			-	64.000.000,00
2.15.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	5 Dokumen	24.236.000,00	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)			27.000.000,00
2.15.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	3 Laporan	34.643.000,00	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)			37.000.000,00
2.15.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>		1 Dokumen	27.905.591.478,00			-	30.180.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
2.15.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	210 Orang/ Bulan	27.784.852.278,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		30.000.000.000,00	
2.15.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	1 Dokumen	120.739.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		180.000.000,00	
2.15.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan administrasi kepegawaian		1 Laporan	80.000.000,00			120.000.000,00	
2.15.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	2 Orang	80.000.000,00	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)		120.000.000,00	
2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran		5 Dokumen	1.532.500.000,00		-	1.552.000.000,00	
2.15.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	7.500.000,00	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)		10.000.000,00	
2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	495.000.000,00	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)		500.000.000,00	
2.15.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	80.000.000,00	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)		80.000.000,00	
2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	10.000.000,00	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)		12.000.000,00	
2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	940.000.000,00	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)		950.000.000,00	
2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran		2 Laporan	985.000.000,00		-	985.000.000,00	
2.15.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Unit	900.000.000,00	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)		900.000.000,00	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
2.15.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	85.000.000,00	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)		85.000.000,00	
2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah pelayanan administrasi perkantoran</i>		3 laporan	645.000.000,00		-	667.000.000,00	
2.15.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	5.000.000,00	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)		7.000.000,00	
2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	290.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		300.000.000,00	
2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	350.000.000,00	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)		360.000.000,00	
2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah pelayanan administrasi perkantoran</i>		3 Laporan	2.215.000.000,00		-	1.790.000.000,00	
2.15.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17 Unit	905.000.000,00	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)		910.000.000,00	
2.15.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	63 Unit	75.000.000,00	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)		80.000.000,00	
2.15.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Unit	1.235.000.000,00	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)		800.000.000,00	
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			20 Laporan	1.539.966.492,00		-	1.579.823.141,00	
2.15.02.1.05	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	<i>Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi</i> <i>Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi</i>		1 Laporan	572.566.492,00		-	629.823.141,00	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
2.15.02.1.05.0001	Penataan Manajemen dan Rekyasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	<i>Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekyasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi</i>	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	150.000.000,00	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)		165.000.000,00	
2.15.02.1.05.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	<i>Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi</i>	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	304.066.492,00	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)		334.473.141,00	
2.15.02.1.05.0005	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	<i>Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi</i>	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	118.500.000,00	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)		130.350.000,00	
2.15.02.1.06	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	<i>Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi</i>		1 Laporan	167.400.000,00		-	0,00	
2.15.02.1.06.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	<i>Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin</i>	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	71.400.000,00	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)		0,00	
2.15.02.1.06.0004	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	<i>Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi</i>	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	96.000.000,00	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)		0,00	
2.15.02.1.10	Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya Melampaui Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan</i>		1 Laporan	450.000.000,00		-	550.000.000,00	
2.15.02.1.10.0003	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Kewenangan Provinsi	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Kewenangan Provinsi</i>	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	450.000.000,00	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)		550.000.000,00	
2.15.02.1.13	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	<i>Jumlah Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan</i>		500 Unit	350.000.000,00		-	400.000.000,00	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
2.15.02.1.13.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	<i>Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan</i>	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500 Unit	350.000.000,00	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)		400.000.000,00	
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN			33 Persen	500.000.000,00			-	550.000.000,00
2.15.03.1.06	Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	<i>Terlaksananya Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas</i>		10 Dokumen	250.000.000,00			275.000.000,00	
2.15.03.1.06.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	<i>Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional</i>	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Dokumen	250.000.000,00	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB), DANA BAGI HASIL (DBH)		275.000.000,00	
2.15.03.1.08	Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	<i>Dokumen Pendukung Pengembangan Pelabuhan Sangsit</i>		1 Dokumen	250.000.000,00			-	275.000.000,00
2.15.03.1.08.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	<i>Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional</i>	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	250.000.000,00	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)		275.000.000,00	
2.15.05	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN			25 Persen	1.100.000.000,00			-	1.575.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
2.15.05.1.01	Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	<i>Jumlah Dokumen Pra Studi Kelayakan Angkutan Umum Massal Berbasis Kereta Api Lintasan Canggü-Mengwi</i>		1 Dokumen	1.100.000.000,00			-	1.575.000.000,00
2.15.05.1.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian	<i>Jumlah Dokumen Rencana Induk Perkeretaapian</i>	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1.100.000.000,00	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)			1.575.000.000,00
	UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ				2.299.413.968,00				2.518.250.000,00
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.299.413.968,00				2.518.250.000,00
2,15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				2.299.413.968,00				2.518.250.000,00
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja		83,90 Nilai	1.139.148.000,00			-	1.168.250.000,00
2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>		1 Laporan 1 Paket	398.148.000,00			-	416.500.000,00
2.15.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	1 Paket	5.248.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			5.500.000,00
2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	1 Paket	160.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			170.000.000,00
2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	1 Paket	900.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	1 Laporan	232.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		240.000.000,00	
2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>		3 Laporan	552.000.000,00		-	555.750.000,00	
2.15.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	1 Laporan	1.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1.750.000,00	
2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	3 Laporan	507.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		510.000.000,00	
2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	3 Laporan	43.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		44.000.000,00	
2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>		2 Laporan	189.000.000,00		-	196.000.000,00	
2.15.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	10 Unit	170.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		175.000.000,00	
2.15.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	18 Unit	19.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		21.000.000,00	
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			E (Tundaan 40-60 Detik)	1.160.265.968,00		-	1.350.000.000,00	
2.15.02.1.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	<i>Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara</i>		14 Unit	800.000.000,00		-	900.000.000,00	
2.15.02.1.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	<i>Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara</i>	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	14 Unit	800.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		900.000.000,00	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
2.15.02.1.05	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi		1 Laporan	360.265.968,00			-	450.000.000,00
2.15.02.1.05.0001	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	1 Laporan	360.265.968,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			450.000.000,00
	UPTD TRANS BALI/TRANS SARBAGITA				66.011.092.162,00				85.619.424.588,00
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				66.011.092.162,00				85.619.424.588,00
2,15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				66.011.092.162,00				85.619.424.588,00
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja		83,95 Nilai	602.581.080,00			-	619.424.588,00
2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan bahan logistik kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		5 Paket	241.324.588,00			-	248.824.588,00
2.15.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Gianyar, Sukawati, Batubulan	1 Paket	1.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1.500.000,00
2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	1 Paket	150.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			155.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
2.15.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	Kab. Gianyar, Sukawati, Batubulan	1 Paket	25.324.588,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		25.324.588,00	
2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	1 Paket	10.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		11.000.000,00	
2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	1 Laporan	55.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		56.000.000,00	
2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Jumlah gedung kantor yang tersedia Jumlah mebel yang tersedia</i>		1 Paket	60.000.000,00		-	65.000.000,00	
2.15.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	1 Paket	60.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		65.000.000,00	
2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tersedia Jumlah jasa pelayanan umum kantor (jasa kebersihan) yang tersedia Jumlah jasa surat menyurat berupa materai yang tersedia</i>		3 Laporan	78.800.000,00		-	81.100.000,00	
2.15.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	1 Laporan	500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		600.000,00	
2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	Kab. Gianyar, Sukawati, Batubulan, Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	1 Laporan	33.300.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		35.000.000,00	
2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	Kab. Gianyar, Sukawati, Batubulan	1 Laporan	45.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		45.500.000,00	
2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah pemeliharaan AC, Laptop, PC dan printer yang tersedia Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas, tenaga administrasi, tenaga supir, pajak kendaraan yang tersedia</i>		29 Unit	222.456.492,00		-	224.500.000,00	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
2.15.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Unit	204.316.492,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		206.000.000,00	
2.15.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	23 Unit	18.140.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		18.500.000,00	
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Indeks kepuasan layanan angkutan Trans Bali/Trans Sarbagita		83 Indeks	65.408.511.082,00			-	85.000.000.000,00
2.15.02.1.08	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Jasa Layanan Angkutan Umum Trans SARBAGITA		85 Unit	65.408.511.082,00			-	85.000.000.000,00
2.15.02.1.08.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	85 Unit	65.408.511.082,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			85.000.000.000,00
	UPTD PERLENGKAPAN JALAN				2.528.544.092,00				6.965.555.236,00
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.528.544.092,00				6.965.555.236,00
2,15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				2.528.544.092,00				6.965.555.236,00
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja		83,90 Nilai	268.544.092,00			-	295.500.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>		2 Laporan	60.307.600,00			-	67.500.000,00
2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	1 Paket	6.396.000,00	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)			7.500.000,00
2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 Laporan	53.911.600,00	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)			60.000.000,00
2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>		3 Laporan	50.000.000,00			-	55.000.000,00
2.15.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	2 Unit	50.000.000,00	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)			55.000.000,00
2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dibayarkan Pajaknya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara</i>		19 Unit	158.236.492,00			-	173.000.000,00
2.15.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	3 Unit	145.616.492,00				160.000.000,00
2.15.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	16 Unit	12.620.000,00	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)			13.000.000,00
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	<i>Persentase Sarana dan Prasarana Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam kondisi baik</i>		49,48 Persen	2.260.000.000,00			-	6.670.055.236,00
2.15.02.1.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	<i>Jumlah perlengkapan jalan di jalan provinsi yang tersedia Jumlah perlengkapan jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara</i>		274 Unit 200 Unit	2.260.000.000,00			-	6.670.055.236,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
2.15.02.1.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	274 Unit	1.610.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5.470.055.236,00	
2.15.02.1.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200 Unit	650.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1.200.000.000,00	
	UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN				443.256.784,00			470.050.000,00	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				443.256.784,00			470.050.000,00	
2,15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				443.256.784,00			470.050.000,00	
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<i>Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja</i>		83,90 Nilai	303.256.784,00		-	320.050.000,00	
2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bahan Bacaan dan Perundang-undangan Yang Tersedia Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang Tersedia Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Jumlah Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang tersedia		3 Laporan	175.626.784,00		-	183.000.000,00	
2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	36.340.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		40.000.000,00	
2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	2.800.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3.000.000,00	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	136.485.984,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		140.000.000,00	
2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Jasa Surat Menyurat yang dilaksanakan		1 Paket	500.000,00		-	550.000,00	
2.15.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		550.000,00	
2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Yang Terpelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Terpelihara Jumlah Sarana Prasarana Pendukung yang Tersedia		2 Laporan	127.130.000,00		-	136.500.000,00	
2.15.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	121.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		130.000.000,00	
2.15.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8 Unit	6.130.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6.500.000,00	
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Pelabuhan Pengumpan Regional yang Menerapkan SPM		67 Persen	140.000.000,00		-	150.000.000,00	
2.15.03.1.09	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional yang tersedia		19 Laporan	140.000.000,00		-	150.000.000,00	
2.15.03.1.09.0004	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19 Laporan	140.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		150.000.000,00	
J U M L A H					107.844.243.976,00			134.636.102.965,00	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari arah kebijakan sesuai dengan RKPD 2026 dan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Provinsi Bali 2025-2029, maka rancangan rencana kerja program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 mengampu 4 Program yang dilaksanakan oleh 4 Bidang maupun 4 UPTD pada Dinas Perhubungan Provinsi Bali, adalah terdiri dari :

I. Program Penunjang urusan pemerintahan Daerah Provinsi Bali dilaksanakan oleh Bidang Sekretariat dan bagian Katata Usahaan pada masing – masing UPTD.

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026			
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase peningkatan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Bali	Denpasar	100%	39.898.127.701	APBD

Rencana sub kegiatan yang akan mendukung Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

4. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
5. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
8. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
9. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
11. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
12. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
13. Pengadaan Mebel
14. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
15. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
16. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
17. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
18. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
19. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

II. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dilaksanakan oleh 6 kegiatan dimana 4 kegiatan di bidang dan 2 kegiatan di UPTD di Dinas Perhubungan Provinsi Bali yaitu Bidang Angkutan Jalan, Lalu Lintas Jalan, UPTD. Perlengkapan Jalan, UPTD Pusat Pengendalian Lalu Lintas Angkutan Jalan dan UPTD Trans Bali/Trans Sarbagita dengan atau diampu oleh 6 kegiatan yaitu:

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026			
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Tingkat pelayanan simpang (tundaan) pada simpang ATCS	9 Kab./ Kota	E (tundaan 40-60 dtk)	3.701.994.760	APBD
Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	Presentase manajemen rekayasa lalu lintas yang ditindak lanjuti	9 Kab./ Kota	100%	1.162.113.313	APBD
Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya Melampaui Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.	Presentase jaringan transportasi darat yang terlayani	9 Kab./ Kota	75	700.000.000	APBD
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Presentase jaringan transportasi darat yang terlayani	9 Kab./ Kota	75	447.283.980	APBD
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Indeks Kepuasan Layanan Angkutan Perkotaan di Sarbagita	9 Kab./ Kota	83	72.500.000.000	APBD
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Persentase Sarana dan Prasarana Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam kondisi baik	9 Kab./ Kota	49,48	3.487.282.752	APBD

Rencana sub kegiatan yang akan mendukung Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi.
2. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi.
3. Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi
4. Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin.
5. Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin.
6. Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Sewa Khusus dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi
7. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
8. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
9. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi.
10. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan.

III. Program Pengelolaan Pelayaran akan dilaksanakan oleh 2 (dua) bidang yaitu Bidang Pelayaran dan UPTD Penyelenggaraan Pelabuhan, indikator program yang akan menjawab Program Pengelolaan Pelayaran dengan kebutuhan anggaran pada tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026			
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Persentase Pembangunan/Lanjutan/ Penyelesaian dan Pengembangan Pelabuhan Laut	9 Kab./ Kota	67%	61.382.332.460	APBD
Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Persentase pelabuhan pengumpan regional yang operasionalnya menerapkan SPM	9 Kab./ Kota	50%	160.471.230	APBD

Rencana sub kegiatan yang mendukung terwujudnya Program Pengelolaan Pelayaran pada tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional.
2. Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas
3. Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional.

IV. Program Pengelolaan Perkeretaapian diampu oleh 1 Bidang Keterpaduan Moda dengan kegiatan pada tahun 2026 masih sebatas kajian – kajian dan koordinasi untuk mewujudkan transportasi menggunakan keretaapi di Provinsi Bali. Adapun indikator program dan kebutuhan pagu yang akan di perlukan adalah sebagai berikut:

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026			
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	Presentase perencanaan pembangunan infrastruktur perkeretaapian yang telah memiliki kriteria kesiapan	9 Kab./ Kota	33.33	1.500.000.000	APBD

Rencana sub kegiatan untuk mewujudkan Program Pengelolaan Perkeretaapian adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian.

BAB V

PENUTUP

Dengan disusunnya Rencana Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Bali Tahun 2026, diharapkan dokumen ini dapat menjadi pedoman yang adaptif dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, sebagai respon terhadap dinamika kebutuhan pembangunan serta perubahan kebijakan dan kondisi aktual di lapangan. Diharapkan Rencana kerja ini dapat memberikan gambaran yang jelas, terukur, dan akuntabel baik secara kuantitatif maupun kualitatif, serta menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja di tahun-tahun berikutnya.

Mengingat sangat kompleksnya visi, misi dan tujuan yang hendak dicapai, sedangkan kewenangan Provinsi pada bidang perhubungan masih sangat sedikit, maka kebijakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan akan mencapai sasaran dengan baik jika ada dukungan dan partisipasi dari berbagai pihak. Dukungan dalam bentuk kebijakan dan penganggaran sangat diharapkan untuk mewujudkan pencapaian sasaran.

Dukungan penganggaran terhadap Program Prioritas dan pendukung keberhasilan pencapaian sasaran sangat diharapkan dapat konsisten dipertahankan, sehingga target dapat tercapai.

Dengan adanya dukungan dan partisipasi masyarakat secara luas, maka diharapkan pelayanan jasa perhubungan dapat dilaksanakan dengan lancar, tertib, teratur, aman, nyaman dan menjangkau keseluruhan wilayah sehingga mampu menunjang pembangunan Bali secara keseluruhan dan berkelanjutan.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Apabila di dalam pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tersebut terjadi keterbatasan dana atau efisiensi anggaran, maka target Rencana Kerja (Renja) disesuaikan. Tindak lanjut alokasi anggaran atas proses penganggaran yang tidak sesuai dengan dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan, maka akan berpengaruh pada tingkat capaian target yang telah ditetapkan.